

**SKRIPSI**

**PERAN CSR PT. SOCFINDO DALAM MENINGKATKAN  
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KECAMATAN  
AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN**

**Oleh :**

**AHMAD MAULANA SIREGAR**

**NPM :1403090003**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

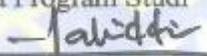
Nama Lengkap : **AHMAD MAULANA SIREGAR**  
N P M : 1403090003  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : **PERAN CSR PT. SOCFINDO DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KABUPATEN ASAHAN KECAMATAN AEK KUASAN**

Medan, 26 November 2018

Pembimbing

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP**

Dekan,



  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : AHMAD MAULANA SIREGAR

N P M : 1403090003

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pada hari, tanggal : JUMAT, 19 OKTOBER 2018

W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. MOHD YUSRI ISFA M.Si

PENGUJI II : Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP

PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

### PANITIA UJIAN

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, AHMAD MAULANA SIREGAR, NPM : 1403090003,  
menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan sayajuga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.



Medan, Oktober 2018

AHMAD MAULANA SIREGAR



UIN  
Cerdas dan Terpuji  
Agar surut diri agar di bebaskan  
tan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Ahmad Maulana Sirgar  
NPM : 1403090003  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Judul Skripsi : Peran CSR PT. Socfindo dalam meningkatkan Perhatian dan Kesehatan di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	11/5/2018	Bimbingan proposal skripsi	
2.	24/05/2018	Bimbingan proposal skripsi	
3.	28/05/2018	Bimbingan dan revisi/ACC seminar proposal	
4.	17/07/2018	Bimbingan dan Revisi pasca seminar proposal	
5.	28/07/2018	Bimbingan dan acc departemen wawancara	
6.	04/10/2018	Bimbingan dan Revisi skripsi (bab 4, dan 5) + abstrak	
7.	05/10/2018	Bimbingan dan Revisi skripsi (Bab 4, dan 5) + abstrak	
8.	09/10/2018	Bimbingan, Revisi Bab 5 + abstrak + cover	
9.	14/10/2018	Revisi cover + Bab 5	
10.	16/10/2018	ACC Siulang meja kerja	

Medan, 17 Oktober 2018

Dean,

Dr. Adifin Saleh S.Sos M.S.P

Ketua Program Studi,

(H. Mujahidin M.A.P)

Pembimbing ke : .....

Dr. Adifin Saleh S.Sos M.S.P

## **ABSTRAK**

### **PERAN CSR PT. SOCFIN DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI KECAMATAN AEK KUASAN KABUPATEN ASAHAN**

**AHMAD MAULANA SIREGAR**  
**1403090003**

Pendekatan CSR hendaklah dilakukan secara holistic, artinya, pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dalam kegiatan bisnis semata, melainkan juga bergerak dari yang sifatnya derma (*charity*) menuju kearah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (*communitdevelopment*). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Key Informan/Narasumber terdiri dari: Camat Aek Kuasan, Humas PT. Socfin, Sekcam Aek Kuasan, 2 orang masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan CSR masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Camat Aek Kuasan kepada masyarakat Aek Kuasan. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif. Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Aek Kuasan serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Aek Kuasan. Faktor-faktor penghambat efektifitas Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, Partisipasi Masyarakat.

Kata Kunci: Peran Corporate Social Responsibility, Pendidikan dan Kesehatan

## KATA PENGANTAR



*Assalammual'aikum, Wr.Wb.*

Puji dan Syukur diucapkan kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Peran CSR PT.Socfindo Dalam Meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten asahan”**.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Teristimewa kepada ayahanda Amirudin Siregar dan ibunda Hj.Hayati tercinta serta Istri tercinta Milva Nabilah Silvanny yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil, dorongan serta semangat sehingga terselesainya Skripsi ini.

2. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Dr.Arifin Saleh Siregar selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi Ibnu, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I dan Bapak Abrar Adhani S.Sos.,M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H.Mujahiddan S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Dr.Arifin Saleh Siregar selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh serta karyawan/Wati Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku Asnawi Ahmad S.sos, Muhammad Nazri Manday S.Sos, Ahmad Maherdika, Faizul Hamdi Hsb S.Sos, Taufik Lubis, Dede Kurniawan Sufi, Irvan Suhandi, Riswandi Hst, Ayuning Tyas, Diah Kirana Sekar Ayu, Wulan Dewi Sawitri, yang telah menemani penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

9. Kepada teman-teman Ibal, Aris, Fiza yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
10. Kepada Kak Armayana Siregar, Kakak kandung saya yang telah banyak berjasa membantu penulis dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Oktober 2018  
Hormat Saya

**Ahmad Maulana Siregar**

**1403090003**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
A. Peran .....	10
B. Program CSR .....	12
C. Pendidikan.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Kerangka Konsep .....	27
C. Definisi Konsep.....	27
D. Kategorisasi.....	28

E. Narasumber .....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data .....	30
H. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	32

#### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian .....	35
B. Pembahasan.....	50

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memasuki milenium ketiga dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan multidimensi yang menyentuh berbagai tatanan kehidupan mendasar manusia, bukan hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial, budaya dan akhlak. Berbagai bentuk kemiskinan sosial juga banyak diperlihatkan, seperti miskin pengabdian, kurang disiplin dan kurang empati terhadap masalah sosial.

Meskipun kedudukan pendidikan cukup strategis untuk perubahan suatu bangsa, namun bangsa kita belum cukup optimis mengandalkan posisi tersebut karena pada kenyataannya kondisi dan hasil pendidikan di Indonesia belum memadai. Dilihat dari latar belakang pendidikan, gambaran SDM belum menggembirakan. Berbagai ketimpangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat telah terjadi, di antaranya adalah: a) Ketimpangan antara kualitas output pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan; b) Ketimpangan kualitas pendidikan antar desa dan kota, antar Jawa dan luar Jawa, antar penduduk kaya dan penduduk miskin.

Selain faktor paradigma pendidikan nasional yang memisahkan peranan agama dari kehidupan, mahalnya biaya pendidikan dan terbatasnya sarana prasarana pendidikan juga merupakan penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Salah satu solusi dalam meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa adalah dengan memanfaatkan peran aktif pihak ketiga atau Swasta melalui peran CSR (Corporate Social Responsibility) yang lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atas keberadaannya beroperasi pada sebuah wilayah.

Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab perusahaan adalah melanjutkan komitmen sebagai bisnis untuk bersikap secara ethical, bermoral dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan dan tenaga kerja dan keluarganya maupun komunitas lokal dan masyarakat. Perusahaan juga harus mengintegrasikan antara kegiatan sosial dan masalah lingkungan yang berhubungan dengan operasi bisnis.\

Terlepas dari sisi negatif dan beragam tanggapan dari tanggung jawab sosial perusahaan, patut disyukuri, namun sedikit mengkhawatirkan pada sisi lain ini. Pertama karena kondisi ini menunjukkan makin meningkatnya pertumbuhan dunia bisnis, pemerintah dan juga media akan CSR yang tidak saja memberikan dampak positif bagi perusahaan namun juga kepada masyarakat. CSR sebagai sebuah model yang muncul dan berkembang dari negara maju perlu untuk diterjemahkan dalam konteks di Indonesia.

Menurut Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2/SE/XII/2012 menyatakan bahwa adanya kewajiban membangun kebun plasma dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan yang mengajukan Hak Guna Usaha serta legalisir dokumen/data pendukung yang berbentuk.

Sebagaimana diketahui bahwa devisa negara dari sektor perkebunan begitu besar, namun sebagian masyarakat di sekitar perkebunan masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan yang menyebabkan sebagian besar diantaranya tidak memiliki daya cipta untuk berkembang.

Dilain pihak masyarakat berhadapan dengan perkebunan yang modern yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan kehidupan SDMnya yang telah mapan. Berbarengan dengan suasana keterbukaan dan iklim yang demokratis, situasi tidak jarang menjadi bibit atau sumber munculnya konflik antara masyarakat dengan pihak perkebunan. Dalam rangka merespon kondisi tersebut pihak perkebunan dan perusahaan-perusahaan lainnya telah melakukan program CSR (*corporate social responsibility*).

Isu tanggung jawab sosial perusahaan sudah cukup lama muncul di negara-negara maju, namun di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini mengalami perhatian yang cukup intens dari berbagai kalangan (perusahaan, pemerintah, akademisi, dan NGOs). Masih relatif barunya konsep CSR tersebut diperbincangkan oleh berbagai kalangan, membuat pemahaman terhadap konsep CSR tersebut juga masih berbeda-beda, dan dipraktikkan secara berbeda-beda pula.

Pada awalnya, program CSR didasarkan pada pemikiran bahwa perusahaan tidak lagi dipandang sebagai entitas pencetak laba yang eksklusif bagi *shareholders*nya tetapi juga mengemban misi sosial bagi masyarakat sekitarnya dan memandang aktifitas usaha yang dilakukan sebagai bagian dari eksistensi mereka ditengah-tengah masyarakat. Ia merupakan bagian dari strategi bisnis bagi kelangsungan usaha dengan mengurangi resistensi masyarakat sekitar. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan cara membangun kerjasama antar *stakeholders* yang difasilitasi perusahaan tersebut. Untuk itu mengembangkan CSR harus mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).

Prinsip keberlanjutan ini mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* ini diharapkan mendukung penuh, yaitu: perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Seringkali dalam praktek, CSR ini disamakan dengan derma (*charity*), sehingga ketika ada perusahaan yang membagi-bagikan hadiah kepada masyarakat disekitar perusahaan sudah dianggap melaksanakan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat. Sesungguhnya, konsep CSR tidaklah sama dengan karikatif (*charity*) atau *philanthropy* (kedermawanan) yang lebih

sepontannya dan kurang memiliki efek jangka panjang bagi masyarakat dalam arti pemberdayaan mereka baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Pendekatan CSR hendaklah dilakukan secara *holistic*, artinya, pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan tidak dalam kegiatan bisnis semata, melainkan juga bergerak dari yang sifatnya *derma (charity)* menuju kearah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (*communit development*). Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (*sustainability*) sehingga perusahaan juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, CSR lebih dimaknai sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan yang melakukannya. Dalam konteks Indonesia umumnya, dan Sumatera Utara khususnya, bila perusahaan-perusahaan, baik perusahaan-perusahaan milik negara maupun swasta (nasional dan asing) mau menjalankan CSR melalui pendekatan yang *holistic*, niscaya akan sangat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat dalam arti peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas secara berkelanjutan, khususnya yang terlibat secara langsung dengan program-program CSR tersebut. Khusus di Aceh Singkil, terdapat cukup banyak perusahaan-perusahaan besar negara seperti PTPN (BUMN) yang bergerak disektor perkebunan, dan perusahaan swasta nasional dan asing yang juga bergerak disektor perkebunan, serta perusahaan-perusahaan lainnya diberbagai sektor (pertambangan, industri, jasa, dan lain sebagainya).

Perusahaan-perusahaan tersebut, baik negara maupun swasta (nasional dan asing), beberapa diantaranya sudah melakukan apa yang disebut sebagai *Corporate social responsibility* (CSR), meskipun belum sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan yang holistic, bahkan sebagian besar hanya dilakukan dalam bentuk derma (*Charity*). Akibatnya, maka sesungguhnya dari CSR yang menjadi alasan penting mengapa kalangan bisnis mau merespon dan mengembangkan isu CSR belum tercapai sepenuhnya.

Namun sangat disayangkan, ketika terjadi perkembangan usaha tidak diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat, melainkan kemiskinan dan pengangguran yang semakin mengkhawatirkan. Dari sekian banyak CSR yang telah diberikan PT. Socfin ternyata belum menunjukkan progres yang signifikan, terutama dalam bidang pemberdayaan dan pelatihan. Hal ini dikarenakan karena kurangnya ide-ide baru, serta pengawasan dan evaluasi terhadap keberlanjutan pelatihan yang diberikan, sehingga sedikit sekali masyarakat yang berhasil memanfaatkan pelatihan tersebut hingga sukses, dan tidak ada hasil berkelanjutan. Hal ini mengakibatkan kepercayaan anggota menjadi berkurang.

Jumlah sarana pendidikan pada Tahun 2016 di Kecamatan Aek Kuasan secara keseluruhan berjumlah 15 unit yang terdiri dari 3 (tiga) jenis fasilitas pendidikan, meliputi SD, SLTP dan SLTA (Negri dan Swasta). Fasilitas pendidikan yang terbanyak terdapat di Desa Tanjung Siram, Desa Perbaungan dan Desa Kampung Dalam dengan jumlah masing-masing 4 uit

SD Negeri dan 3 unit SD swasta yang berada di Desa Perbaungan. Fasilitas pendidikan tingkat SD yang menyebar di seluruh desa di Kecamatan Aek Kuasan lebih banyak jumlah SD Negeri yaitu sebesar 8 unit.

PT SOCFIN Aek Kuasan menangani langsung kegiatan pembibitan kelapa sawit dan karet, yang pemeliharaannya dan penanganannya serta pengolahan produksi hingga terakhir kegiatan pemasarannya. Mala hasil produksi dari perkebunan sebagian besar diekspor dan sisanya dipasarkan didalam negeri sesuai dengan permintaan konsumen yang diterapkan oleh pemerintah. Perkembangan penjualan pada PT SOCFIN setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Partisipasi perusahaan perkebunan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia komunitas lokal memperlihatkan perhatian yang sangat rendah. Berdasarkan hasil observasi kecamatan Aek Kuasan tidak memperoleh perhatian pendidikan dari perusahaan perkebunan kepada masyarakat sekitarnya. Beberapa perusahaan mengklaim telah memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan baik bentuk beasiswa maupun pembangunan infrastruktur pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah pelayanan sosial sehingga mengambil judul studi tentang **“Peran CSR PT. Socfin Dalam Meningkatkan Pendidikan Dan Kesehatan Di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan “**.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan perumusan dalam penelitian ini adalah: “bagaimana peran CSR PT. Socfin dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan?”

## **C. Tujuan & Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran CSR PT. Socfin dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah dibidang ilmu kesejahteraan sosial.

#### **b. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan.

**c. Secara akademis**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk pengembangannya.

**E. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisikan uraian Teoritis yang menguraikan tentang pengertian implementasi, kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik.

**BAB III** : Berisikan Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

**BAB IV** : Pembahasan Analisis Data Penelitian Penyajian Data Dan Pengolahan dan Analisa Data

**BAB V** : Berisikan penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Peran**

Peran merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Peran kerja pegawai yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sondang P. Siagian (2007:24) memberikan definisi sebagai berikut :  
“Peran adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Peran menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi Perannya.

Kurniawan (2005:109) Peran adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Pengertian Peran secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Pengertian Peran tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah

ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, suatu usaha atau kegiatan dikatakan Peran apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat memberikan manfaat yang nyata sesuai dengan kebutuhan.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan peran atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2007:77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator peran organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

## **2. Program CSR**

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum.

Menurut Nurdizal, (2011:15), CSR adalah upaya sungguh – sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Kotler dalam Nurdizal (2011:16), CSR adalah “*A commitment to improve community well-being through discretionary business practices and contributions of corporate resource*”.

Berdasarkan apa yang diungkapkan Philip Kotler tersebut, CSR merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, seandainya tidak akan berakibat tidak baik pada perusahaan itu sendiri. Di sini terlihat bahwa CSR dilaksanakan masih sebagai hal yang perlu bukan suatu kewajiban atau suatu peraturan yang diharuskan. Sedangkan di Indonesia saat ini, pelaksanaan CSR

merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan. Hal tersebut diatur dalam UU Perseroan.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya perlu memiliki prioritas dan strategi. Eksistensi perusahaan dan pencapaian laba jangka panjang merupakan prioritas perusahaan. Perusahaan dalam mencapai prioritas tersebut memerlukan strategi.

Menurut Nurdizal (2011:16) Kemampuan menghasilkan laba jangka panjang hanya akan terealisasi apabila keberadaan perusahaan dapat berguna dan didukung oleh *stakeholder*. Dukungan *stakeholder* akan terwujud jika dampak negatif pada ranah sosial, ekonomi, dan lingkungan bukan hanya dapat diminimalisir, tetapi justru dapat memberikan dampak positif yang besar bagi *stakeholder*.

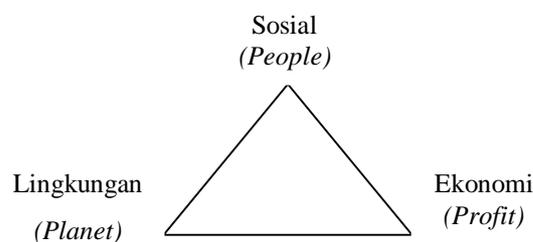
Menurut Daft (2012:182) Adapun pengertian lain dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah kewajiban manajemen untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta perusahaan.

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, *Corporate Social Responsibility* (CSR) ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) 1995 – Lembaga Internasional dalam publikasinya “*Making Good Business Sense*”.

Wibisono (2007:7) mendefinisikan bahwa *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen dunia bisnis untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi

secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi berkelanjutan, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Konsep *Triple Bottom Line* yang dipopulerkan oleh Jhon Elkington dalam Wibisono (2007:32) memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar *profit*, Perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga seperti berikut :



**Gambar 2.1**  
***Triple Bottom Line (3P)***

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada aspek ekonominya saja, namun juga harus memperhatikan pada aspek sosial dan lingkungannya. Konsep CSR akan lebih mudah dipahami, dengan menanyakan kepada siapa sebenarnya pengelola perusahaan (manajer) bertanggung jawab.

Menurut Friedman (Solihin, 2009:6) tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik

perusahaan (*owners*), biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian, tujuan utama dari suatu perusahaan korporasi adalah memaksimalkan laba atau nilai pemegang saham.

Meskipun pengertiannya lugas, CSR dapat menjadi sebuah konsep yang sulit dipahami karena orang-orang yang berbeda memiliki keyakinan yang berbeda mengenai tindakan apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep *Corporate Social Responsibility* melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, serta komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara *stakeholders*.

Menurut Wibisono (2007:72) Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha dapat merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat, maka wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Karena perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. *Ketiga*, kegiatan CSR ini salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.

Menurut Apriwenni (2009) faktor yang mempengaruhi CSR adalah:

- 1) Komitmen Pimpinan Perusahaan (*Organizational responsibility*),

tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan *stakeholder* seperti: pekerja, konsumen, pemegang saham dan masyarakat sekitarnya.

## 2) Ukuran dan Kematangan Perusahaan

Menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

## 3) Regulasi dan Sistem Perpajakan yang diatur Pemerintah

Merupakan tanggung jawab sosial yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut, contohnya kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemangku kepentingan. Agen pemerintah yang tidak selamanya menjalankan kesejahteraan masyarakat secara memuaskan melalui pajak sehingga untuk mengatasinya pemerintah bisa melakukan intervensi dalam bentuk regulasi, subsidi atau metode sejenisnya.

Menurut Lako (2011:90) Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), meskipun dalam jangka pendek menguras kas dan menurunkan laba, tetapi dalam jangka panjang ternyata mendatangkan banyak manfaat ekonomi bagi perusahaan :

- 1) Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang.
- 2) Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan.

- 3) Meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, dan konsumen.
- 4) Meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi, dan produktifitas karyawan.
- 5) Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai perusahaan.
- 6) Meningkatnya reputasi, *goodwill* dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Menurut Susanto dalam Sinamo, (2014:11) Dari sisi perusahaan, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan :

- 1) Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang dijelankannya.
- 2) CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Ketika perusahaan diterpa kabar miring atau bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih mudah memahami dan memaafkannya.
- 3) Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara

konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

- 4) CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*-nya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemampuan yang mereka raih.
- 5) Meningkatnya penjualan seperti konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi yang baik.

Alasan utama mengapa suatu pengungkapan diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* dalam pengambilan keputusan investasi. Berkaitan dengan keputusan investasi, investor memerlukan tambahan informasi non keuangan. Kebutuhan itu didorong oleh adanya perubahan manajerial yang menyebabkan terjadinya perluasan kebutuhan investor akan informasi baru yang mampu menginformasikan hal-hal yang bersifat kualitatif yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi kualitatif dipandang memiliki nilai informasi yang mampu menjelaskan fenomena yang terjadi, dan tindakan apa yang akan diambil oleh manajemen terhadap fenomena tersebut. Informasi kualitatif ini dapat diungkapkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

Menurut Nurlela dan Islahuddin (2008:7) Pertanggung jawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi.

Setiap tahap pengelolaan CSR harus didasari kajian dan penilaian saksama. Hasil kajian yang baik akan mendukung perumusan rencana kegiatan yang andal ([www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com)). Kajian dan Penilaian (*Assessment*) itu meliputi :

- 1) Penilaian Sosial dan Lingkungan untuk Pengambilan Keputusan Investasi (*Social and Environmental Aspects of Investment Screening*),
- 2) Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan Proyek (*Social and Environmental Impacts Assessment*),
- 3) Survei Data Dasar (*Baseline Survey*),
- 4) Penilaian Kebutuhan Masyarakat (*Community Needs Assessments*),
- 5) Pemetaan Isu Strategis dan Pemangku Kepentingan (*Strategic Issues and Stakeholder Mapping*), dan

6) Kajian Kebijakan dan Manajemen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Review on CSR Policy and Management*).

Hendriksen dan Widjajant dalam Agustine (2014:43), mendefinisikan pengungkapan (*disclosure*) sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat *voluntary* (sukarela), *unaudited* (belum diaudit), dan *unregulated* (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu).

Glouter dalam Nurlela dan Islahuddin (2008:6) menyebutkan tema – tema yang termasuk dalam wacana Akuntansi Pertanggung jawaban sosial adalah:

1) Kemasyarakatan

Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

2) Ketenagakerjaan

Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

### 3) Produk dan Konsumen

Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

### 4) Lingkungan Hidup

Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

Martin Freedman dalam Kusumadilaga (2010:17) mengatakan bahwa ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu :

#### 1) Pemeriksaan Sosial (*Social Audit*)

Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari operasi-operasi yang dilakukan perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut.

#### 2) Laporan Sosial (*Social Report*)

Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh para akademis dan praktisioner. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum oleh Dilley dan Weygandt menjadi empat kelompok sebagai berikut:

- a) *Inventory Approach*, Perusahaan mengkompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif.
  - b) *Cost Approach*, Perusahaan membuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut.
  - c) *Program Management Approach*, Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu.
  - d) *Cost Benefit Approach*, Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalah adanya kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan oleh perusahaan terhadap masyarakat.
- 3) Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (*Disclosure In Annual Report*)

Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara, prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui media masa. Perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut.

Darwin dalam Kusumadilaga (2010:20), mengatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan dalam penelitian ini mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan berdasarkan standar GRI (*Global Reporting Initiative*).

*Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

### **3. Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu proses, tehnik, dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka waktu yang relative lama.

Menurut Hasibuan (2012:80) pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian pendidikan menurut instruksi presiden no. 15 tahun 1974, pendidikan adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan pancasila.

Menurut UU Sisdiknas No. 20 (2003), indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yaitu terdiri dari :

- a. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- b. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
- c. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

Menurut Handoko (2009:297) indikator pendidikan adalah :

- a. Tingkat reaksi, yaitu meninjau reaksi peserta terhadap pelatihan, pelatih dan sebagainya terhadap proses dan isi pelatihan.
- b. Tingkat Belajar, yaitu perubahan pada pengetahuan, keahlian dan sikap peserta pelatihan yang diperoleh melalui pengalaman pelatihan.
- c. Tingkat tingkah laku kerja, yaitu perubahan pada tingkah laku kerja para peserta setelah pelatihan.
- d. Tingkat organisasi, yaitu efek pelatihan terhadap organisasi.
- e. Nilai akhir, yaitu manfaat yang didapat dari pelatihan terutama untuk organisasi, tetapi juga individu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.

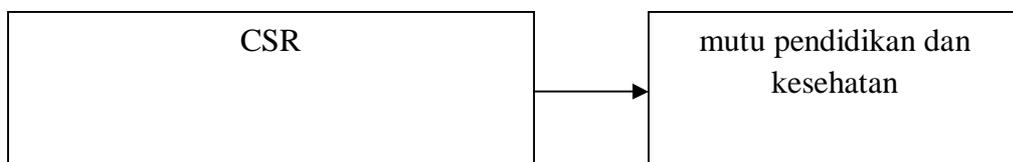
Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Menurut Sugiyono (2012:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci

Agar penelitian dapat memenuhi kriteria ilmiah maka cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data sampai analisis data, diusahakan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan metode yang ada. Sesuai dengan perubahan metode dan prosedur penelitian ini, maka akan dibahas tentang jenis penelitian, populasi, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

## B. Kerangka Konsep

Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran CSR dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Agar konsep tersebut dapat dijelaskan maka kerangka konsep dirangkum dalam sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran sebagai berikut:



## C. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial.

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit penelitian yang akan diteliti. Peran CSR dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.

1. Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Didalam terdapat satu-satunya sumber rill legitimasi yakni efektifitas.
2. Kebijakan publik adalah merupakan studi tentang bagaimana, mengapa dan apa tindakan aktif yang dilakukan pemerintah.
3. Implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak

hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melaikan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

#### **D. Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui apa yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis data dari suatu penelitian. Adapun kategorisasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.1**  
**Kategorisasi Penelitian**

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Peran CSR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan</li> <li>2. Keputusan</li> <li>3. Mekanisme perintah</li> <li>4. Tujuan</li> </ol>
2	Pendidikan dan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana</li> <li>2. Fasilitas</li> <li>3. Reaksi</li> <li>4. Nilai akhir</li> </ol>

## **E. Narasumber**

Narasumber terdiri dari:

- 1) Camat Aek Kuasan
- 2) Humas PT. Socfin
- 3) Sekcam Aek Kuasan
- 4) 2 orang masyarakat

## **F. Teknik pengumpulan Data**

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang berdasarkan pada pemilihan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data, berupa dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Wawancara yang mendalam (*Deep Interview*) yakni metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang sudah disusun kepada informan-informan. Kemudian hasil jawaban yang diperoleh dari informan tersebut dikemas dalam

tulisan yang tidak merubah makna dari inti jawaban dari setiap informan.

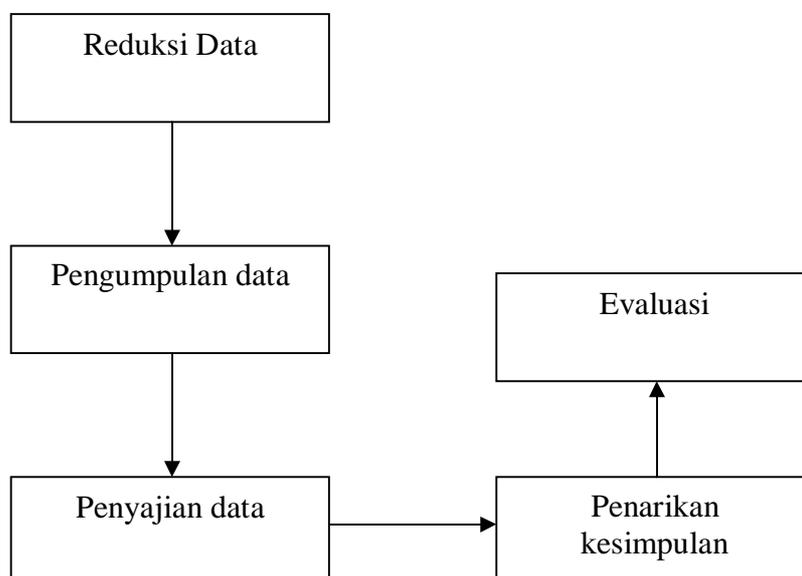
## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa: Dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

## G. Teknik Analisis Data

Data dalam metode Kualitatif mencerminkan interpretasi yang dalam dan menyeluruh atas fenomena tertentu. Data dikelompokkan dalam kelas-kelas tidak menurut angka-angka. Maleong dalam Kriyantono (2007:163) mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap berikut adalah rancangan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:20):



- 1) Reduksi Data (*Data reduction*): Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2010: 63).
- 2) Pengumpulan Data (*Data collection*): Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Penyajian Data (*Data Display*): Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti
- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*): Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
- 5) Evaluasi: Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

## **H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian dilaksanakan di PT. Socfin Aek Kuasan. Waktu penelitian dilaksanakan Bulan September 2018.

## **I. Gambaran Umum Perusahaan**

PT Socfin Medan didirikan pada tahun 1930 dengan nama Socfin Medan (Societe Finaciere Des Conchocs Medan Siciete Anonyme). Perusahaan ini didirikan berdasarkan Akte Notaris William Leo No. 45 tanggal 7 Desember 1930 dan merupakan perusahaan yang mengelola perusahaan perkebunan di daerah Sumatera Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Timur.

Pada tahun 1965 berdasarkan penetapan Presiden no. 6 tahun 1965, keputusan Presiden kabinet Dwikora no. A/d/50/65, Instruksi Menteri Perkebunan no. 20/MPR/M.Perk./65, no. 29/Mtr/M.perk/65 dan SK no.100/M.Perk/65 semua perkebunan yang dikelola PT Socfin Medan berada di bawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia.

Tanggal 29 April 1968 dicapai suatu persetujuan antara pemerintah RI dengan PT Socfin Medan dengan tujuan mendirikan perusahaan perkebunan Belgia dalam bentuk Joint Venture dengan komposisi modal 60 persen bagi Pengusaha Belgia dan 40 persen Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan perkembangan PT Socfin Medan berubah nama menjadi PT Socfin Indonesia (Socfindo), pada tahun 2001 anggaran dasar PT Socfindo mengalami beberapa perubahan berdasarkan akta perubahan dari Notaris Ny.

R.Arie Soetardjo mengenai komposisi saham menjadi 90 persen bagi Pengusaha Belgia dan 10 persen bagi Pemerintah Indonesia.

PT Socfindo merupakan sebuah perusahaan perkebunan dengan komoditi utamanya yaitu Kelapa Sawit dan Karet yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan total areal seluruhnya 49,548.96 Ha. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan industri perkebunan kelapa sawit dan karet kelas dunia yang efisien dalam produksi dan memberikan keuntungan kepada para stake holder.

PT Socfin Indonesia berkantor pusat di Medan beralamatkan Jalan K.L. Yos Sudarso no. 106 Medan dipimpin oleh seorang Principal Director yang ditetapkan oleh Komisaris atau pemilik saham dan seorang General Manager, keduanya disebut Direksi. Penyelenggaraan kegiatan perusahaan dilakukan Direksi dengan dibantu oleh Kepala-Kepala Bagian Departemen dan Group Manager yang memimpin satu rayon perkebunan dimana PT Socfindo memiliki tiga rayon perkebunan (Group I,II,III). Masing-masing Group Manager memimpin beberapa perkebunan di group masing-masing.

PT Socfindo juga memiliki beberapa kebun yang terdiri dari tiga Group. Group satu terdiri dari kebun Sei liput, Seunagan, Seumayam, dan Lae Butar. Untuk group dua yaitu kebun Mata Pao, Bangun Bandar, Tanah Gambus, Tanah Maria, Tanah Besi, dan Lima Puluh, sedangkan group tiga terdiri dari Aek Loba, Padang Pulo, Negeri Lama, Aek Pamienke, dan Halimbe.

PT Socfindo memiliki lima perkebunan karet yaitu Tanjung Maria, Tanah Besi, Lima Puluh, Aek Pamingke, dan Halimbe. Perkembangan usaha karet dari lima perkebunan di PT Socfindo dari tahun ke tahun mengalami produktivitas yang berfluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari penurunan produktivitas tahun 2007 ke 2008 pada Tabel 10. Setelah dari tahun 2008 sampai 2011 dan seterusnya, produktivitas karet mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak terlalu signifikan, sehingga dapat disimpulkan produktivitas karet untuk PT Socfindo secara keseluruhan masih mengalami perkembangan yang cukup baik.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Wawancara**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Aek Kuasan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengalokasian CSR Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; *pertama*, penelitian diawali dengan pengumpulan berbagai dokumen dari Kantor PT. Socfin Aek Kuasan seperti Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab, *Kedua*, penulis melakukan sejumlah wawancara dengan Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan, Sekretaris Desa Aek Kuasan, Tokoh Masyarakat dan masyarakat biasa.

Sedangkan data-data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan serta dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian. Pengumpulan data

dilakukan selama kurang lebih dari tiga (3) minggu dilokasi penelitian, yaitu kantor Desa Aek Kuasan.

Berikut ini akan disajikan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilokasi penelitian yaitu di kantor PT. Socfin Aek Kuasan :

### **1. Adanya tindakan yang dilakukan.**

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan Aek Kuasan yaitu Bapak Juliarso mengenai program CSR yang diberikan oleh PT. Socfin di Desa Kecamatan Aek Kuasan, yaitu sebagai berikut:

*“Program Bina Lingkungan/CSR, bantuan/hibah yang disalurkan meliputi, bencana alam, Pendidikan/Pelatihan, kesehatan, sarana umum, sarana ibadah, dan pelestarian alam.”(Wawancara 27 September 2018).*

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana penegelolaan CSR dalam meningkatkan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan Desa Aek Kuasan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan Aek Kuasan, yaitu bapak M. Husni Saragih, SH yang menyatakan bahwa:

*“Kegiatan musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran CSR tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang*

*hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak, baik perencanaan pembuatan pasar dan pembuatan sumur gali yang kemudian nantinya akan disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan mesin penarik air.”(Wawancara tanggal 27 September 2018).*

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara diatas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang dalam DURK kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan yaitu Bapak Juliarso selaku Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan, M. Husni Saragih, SH selaku Sekretaris Desa, Juni Intani, S.Pd selaku Bendahara dan Bapak Isroq Suyoto Serta Bapak Sujarwo Selaku Masyarakat Desa Aek Kuasan. Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan CSR, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan CSR dalam meningkatkan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan Desa Aek Kuasan.

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan CSR Di Desa Aek Kuasan ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan sarana

kesehatan dengan anggaran 175.152.000 dan sarana pendidikan dengan anggaran sebesar 122.152.000, namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan CSR yang dilakukan di Desa Aek Kuasan belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan CSR yang dilakukan oleh PT. Socfin, salah satunya Masyarakat Desa Aek Kuasan, Bapak Sujarwo yang menyatakan bahwa:

*“Banyaknya anggaran yang diberikan oleh PT. Socfin untuk pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan namun hal tersebut tidak memberikan dampak terhadap peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan, bahkan kantor desa tidak pernah terbuka.”*(Wawancara 27 September 2018).

Pendapat lain terkait belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan CSR, disampaikan oleh Sekretaris Desa yakni Bapak M. Husni Saragih, SH menyatakan bahwa:

*“kegiatan pembangunan desa yakni salah satunya pembangunan sarana kesehatan sebenarnya sudah cukup baik karena akan mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa kesehatan mereka tanpa harus pergi di desa tetangga. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh desa masyarakat dan itu dikarenakan kurangnya tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa”*(wawancara 30 September 2018).

Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah

disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan CSR dalam meningkatkan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan dapat dikatakan kurang efektif.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan CSR yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan CSR dalam meningkatkan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan masih kurang baik.

## **2. Adanya Partisipasi Masyarakat**

Kepala Humas PT. Sofcin Desa Aek Kuasan yaitu Bapak Juliarso yang menyatakan bahwa:

*“Tingkat kepedulian Desa terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah.”* (Wawancara 27 September 2018).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah desa masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi

masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa.

Peran partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan CSR tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan beserta aparatur desa perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan CSR dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan CSR dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan seperti, pembangunan sarana kesehatan, pembuatan sumur gali dan pengadaan bibit pala.

Namun yang terjadi Di Desa Aek Kuasan tidak terjadi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan CSR, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan. Berikut informasi yang diperoleh dari pernyataan Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan Aek Kuasan, Bapak Juliarso yang menyatakan bahwa:

*“Dalam setiap tahapan Pengelolaan CSR yang di lakukan, partisipasi masyarakat masih sangat rendah dimana masyarakat yang hadir hanya sedikit, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan. Hal ini selain masyarakat punya kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap kegiatan desa sangat rendah.”*(Wawancara 27 September 2018).

Hasil penelitian diatas senada dengan yang disampaikan Bapak M.

Husni Saragih, SH sebagai Sekretaris Desa Aek Kuasan menyatakan bahwa:

*“Proses Pengelolaan CSR dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Namun setiap tahapan di laksanakan partisipasi masyarakat itu masih kurang.”*(Wawancara 27 September 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan ini yaitu partisipasi masyarakat dalam proses Pengelolaan CSR yang ada Di Desa Aek Kuasan masih tergolong sangat rendah, terbukti dari setiap tahapan Pengelolaan CSR hampir tidak ada keterlibatan masyarakat.

Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat, yaitu Bapak Sujarwo yang menyatakan bahwa:

*“Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dan tidak suka dengan kinerja Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan sekarang selain kurangnya peduli dengan kondisi sosial masyarakat, juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa.”*(Wawancara 28 September 2018).

Pendapat lain yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Desa Aek Kuasan yaitu Bapak Isroq Suyoto yang menyatakan bahwa:

*“Kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa*

*persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat.”(Wawancara 27 September 2018).*

Informasi yang diperoleh dari responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan CSR Di Desa Aek Kuasan bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan CSR masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Aek Kuasan yaitu pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan. Informasi yang diperoleh dari responden bahwa dalam kegiatan tersebut tidak ada sama sekali partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut.

### **3. Adanya Akuntabilitas dan Transparansi**

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan CSR dalam meningkatkan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh pemerintah desa, namun penyusunan laporan pertanggung Jawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga Desa Aek Kuasan serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan CSR.

Tabel 4.8 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan CSR

Variable	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persen (%)
Pertanggung Jawaban	Pihak penyusunan LPJ	Pemerintah desa bersama BPD	5	16,67
		Pihak lainnya	7	23,33
		Tidak tahu	27	60
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	Kualitas LPJ	Baik	19	63,33
		Tidak tahu	11	36,67
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	Evaluasi Kegiatan Bersama masyarakat	Ada	2	6,67
		Tidak ada	24	80
		Tidak tahu	4	27,33
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Sumber :Diolah dari Kantor Desa Aek Kuasan Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 5 orang atau 16,67% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama BPD, sedangkan 7 orang lainnya atau 23,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban disusun oleh pihak lainya yaitu pihak ketiga yang bukan berasal dari unsur pemerintah atau lembaga Desa Aek Kuasan. Sedangkan sisanya sebanyak 27 orang atau 60% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggungjawaban Desa Aek Kuasan tersebut dan hasil penelitian menunjukan bahwa, laporan pertanggungjawaban Desa Aek Kuasan memang tidak disusun oleh pemerintah desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya.

Pernyataan diatas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Bapak

M. Husni Saragih, SH selaku Sekretaris Desa Aek Kuasan, yang menyatakan bahwa:

*“Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Aek Kuasan memang belum disusun oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada didesa, dikarenakan kualitas sumberdaya aparatur desa sangat rendah atau belum memadai untuk menyusun LPJ, tetapi hal ini harus dimaklumi karena ini merupakan hal yang baru bagi pemerintah desa, khususnya diDesa Aek Kuasan ini.”*(Wawancara 27 September 2018).

Selanjutnya pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Desa Aek Kuasan sudah baik, dimana dari 30 responden sebanyak 19 orang atau 63,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Aek Kuasan dijadikan percontohan untuk semua desa di Kabupaten Asahan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan Aek Kuasan yaitu Bapak Juliarso, yang mengemukakan bahwa:

*“Desa Aek Kuasan ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Aek Kuasan telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Asahan.”*(Wawancara 28 September 2018).

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran CSR ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini

mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan yang terjadi di Desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Aek Kuasan tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Aek Kuasan. Dari 30 responden hanya ada 2 orang responden atau 6,67% yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa Aek Kuasan dan sebanyak 24 orang responden atau 80% mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, adapun 6 orang lainnya mengatakan tidak tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Sujarwo yang menyatakan bahwa:

*“Pemerintah Desa Aek Kuasan jarang mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Aek Kuasan ini, sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah ada permasalahan di desa atau tidak.”*(Wawancara 28 September 2018)

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Bapak Isroq Suyoto yang menyatakan bahwa:

*“Yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat Desa Aek Kuasan ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Aek Kuasan ini.”*(Wawancara 27 September 2018)

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Aek Kuasan dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan adalah hasil karya pihak ketiga dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Aek Kuasan namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan peertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Aek Kuasan dapat dikatakan kurang efektif.

#### **4. Adanya Pembinaan Dari Pemerintah**

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Desa Aek Kuasan dalam pengelolaan CSR dalam meningkatkan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Aek Kuasan sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan CSR, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan CSR dalam meningkatkan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

Baik Pemerintah Desa Aek Kuasan maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan CSR dalam meningkatkan pembangunan

fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola CSR, secara lebih khusus kemampuan Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan dan Bendahara Desa dalam mengelola CSR yang di peroleh dari APBdesa.

Hasil wawancara dengan Bapak Juliarso sebagai Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan Aek Kuasan.

*Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah Desa Aek Kuasan sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparaturnya pemerintah desa agar aparaturnya pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparaturnya desa miliki khususnya dibidang Pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan.*

Hasil wawancara diatas senada dengan Bapak M. Husni Saragih, SH sebagai Sekretaris Desa Aek Kuasan menyatakan bahwa:

*“Kualitas sumber daya manusia di Desa Aek Kuasan sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparaturnya pemerintah desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan*

*kesempatan untuk mendapatkan pelatihan.” (Wawancara 27 September 2018).*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan CSR dalam meningkatkan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan CSR yang ada di Desa Aek Kuasan masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Camat Aek Kuasan.

Hal ini terbukti dengan ketidak mampuan pelaksana kegiatan pengelolaan CSR dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana pengelolaan CSR dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Camat Aek Kuasan.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan CSR masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal CSR yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan CSR, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan CSR tersebut.

Selain itu, Pengelolaan CSR dilakukan melalui proses sosialisasi. Informasi yang di peroleh melalui sosialisai yang di adakan pemerintah Desa Aek Kuasan dalam proses Pengelolaan CSR belum cukup baik. Dimana dari 30 responden, semuanya sependapat bahwa sosialisasi Pengelolaan CSR dari pemerintah Kabupaten dan Kecamatan hanya sampai pada pemerintah desa selaku pelaksana Pengelolaan CSR.

Sedangkan kepada masyarakat tidak ada pelaksanaan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh salah satu anggota masyarakat, yaitu Bapak Sujarwo yang mengemukakan bahwa:

*“Tidak pernah ada sosialisasi kepada kami terkait Pengelolaan CSR sebelumnya, jika memang ada pasti hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat informasi. Pada saat musrembang di adakan oleh pemerintah desa itu hanya jumlah anggaran yang disebutkan, terkait penggunaan anggaran itu tidak di jelaskan.”* (Wawancara 28 September 2018).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat terkait kurangnya informasi dari pihak pemerintah desa yakni Bapak Isroq Suyoto yang menyatakan bahwa:

*“Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai tugas dan tanggungjawab kami dalam setiap ada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, karena kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Kabupaten/Kota bahkan dari pemerintah desa kami tidak pernah*

*mendapatkan informasi mengenai setiap penggunaan anggaran ataupun kegiatan yang akan dilakukan di desa.”(Wawancara 27 September 2018).*

Dari hasil penelitian bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan CSR, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di desa.

## **B. Pembahasan**

Pengelolaan CSR mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan CSR (CSR).

CSR (CSR) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. CSR (CSR) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Pengelolaan CSR dalam kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan merupakan proses pengendalian, pengaturan,

mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik berupa sarana kesehatan dan pendidikan dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat Di Desa Aek Kuasan agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Tahap perencanaan Pengelolaan CSR di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksana CSR yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahapan perencanaan di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrembang desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Tahapan Perencanaan Pengelolaan CSR Desa Aek Kuasan Dalam Kegiatan Musrembang.

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (orang)	Persen (%)
		Hadir	20	66,66
	Kegiatan Musrembang	Hadir dan Berpendapat	-	-
		Tak hadir	10	33,33
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
		Jumlah Anggaran	20	66,67
Perencanaan	Pokok	Penyusunan	3	10
	Bahasan	Rencana		
		Tidak tahu	7	23,33
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
		Tersusunnya DURK	-	-
	Hasil Musrembang	Belum Tersusunnya DURK	23	76,67
		Tidak tahu	7	23,33
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	Sosialisasi	Ada	3	10
	DURK	Tidak ada	21	70
	Kepada masyarakat	Tidak tahu	6	20
		<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

Dari tabel diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam

musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 30 responden kalangan masyarakat, sebanyak 20 orang atau 66,66 % yang menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, tetapi mereka tidak menyampaikan aspirasi/usulan rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang atau 33,33 % lainnya tidak hadir.

Selanjutnya Tabel 4.6 diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses musrembang desa pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dari 30 responen, hanya 3 orang atau 10 % yang mengatakan bahwa dalam musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 20 orang atau 66,67 % lainnya mengatakan bahwa dalam musrembang pemerintah desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa,dan sisanya sebanyak 7 orang atau 25,93 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Isroq Suyoto yang mengatakan bahwa:

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan Desa Aek Kuasan tidak berjalan dengan baik, terbukti tidaka adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam tabel 4.6 Terlihat bahwa 30 orang responden, seluruh responden yang hadir yaitu sebanyak 23 atau 76,67 % sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan. Sedangkan 7 orang responden lainnya atau 23,33 % mengatakan tidak tahu sebab mereka tidak menghadiri kegiatan musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam

meningkatkan kesehatan dan pendidikan Desa Aek Kuasan.

Terkait proses Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan, Pemerintah Desa Aek Kuasan terlebih dahulu menyusun tim pelaksana CSR yang terdiri dari Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan CSR terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran CSR serta bagaimana proses pengelolaan CSR, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan CSR menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan CSR, serta dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses

### Pengelolaan CSR.

Selain begitu banyaknya aspirasi, kegagalan dalam tahapan perencanaan terlihat dari menggelembungnya dana pelaksanaan program desa lainnya yang kemudian menghapus program kerja lainnya yang telah direncanakan seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan Kepala Humas PT. Socfin Aek Kuasan dengan program kerja perjalanan dinas luar daerah sekretaris desa.

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan CSR di Desa Aek Kuasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan CSR Di Desa Aek Kuasan ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan yakni pembangunan pasar dengan anggaran Rp 175.152.000 dan pembuatan sumur gali dengan anggaran sebesar Rp 12.152.000, serta pengadaan bibit pala dengan anggaran sebesar Rp 96.680.000 dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan CSR yang dilakukan di Desa Aek Kuasan belum efektif.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban Pengelolaan CSR di Desa

Aek Kuasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemerintah Desa Aek Kuasan dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Aek Kuasan. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Aek Kuasan dapat dikatakan kurang efektif.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Aek Kuasan dalam proses Pengelolaan CSR dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Desa Aek Kuasan yaitu sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan CSR yang ada di Desa Aek Kuasan masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Camat Aek Kuasan khususnya bendahara Desa Aek Kuasan hanya tamatan SMA.

Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan pelaksana kegiatan Pengelolaan CSR dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana Pengelolaan CSR dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Camat Aek Kuasan.

## **2. Informasi**

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan CSR adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan CSR, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan CSR masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal CSR yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan CSR, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan CSR tersebut.

## **3. Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan masih kurang baik. Hal ini dari setiap proses tahapan Pengelolaan CSR belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan CSR.

Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan CSR. Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi (2012). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan CSR Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Aliantan sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam Pengelolaan CSR tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan Pengelolaan CSR yang sekaligus menjadi semangat UU Desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan Di Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dimana dalam proses Pengelolaan CSR ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan CSR masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Camat Aek Kuasan kepada masyarakat Aek Kuasan. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran CSR dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan CSR yang dilakukan di Desa Aek Kuasan masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses antara

lain

2. Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak disusun oleh pemerintah Desa Aek Kuasan serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Aek Kuasan. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan CSR tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan CSR yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.
3. Faktor-faktor penghambat efektifitas Pengelolaan CSR dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan di Desa Aek Kuasan yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM), Informasi, Partisipasi Masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dalam proses Pengelolaan CSR yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Camat Aek Kuasan kepada masyarakat Desa Aek Kuasan. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Aek Kuasan melakukan transparansi penggunaan anggaran CSR agar seluruh masyarakat

mengetahui pengalokasian CSR sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Aek Kuasan sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan CSR.

2. Sebagai Pemerintah Desa Aek Kuasan Kabupaten Asahan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola CSR. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan CSR sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari CSR.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Apriwenni, Prima. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Laporan Tahunan Perusahaan untuk Industri Manufaktur Tahun 2008. *Dikta Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 6 No. 1
- Arikunto, Suharsimi, 2004: *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta.
- Daft, L. Richard. 2012. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Danang Sunyoto.2012. *Sumber Daya Manusia*, Jakarta, CAPS
- Edy Sutrisno. 2013. *Gaya kepemimpinan*. Jakarta : Kencana
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indah Puji Hartatik. 2014. *Buku Praktis Mengembangkan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Laksana
- Irham Fahmi. 2013. *Perilaku Organisasi Teori Dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta
- Ismail Nawawi. 2013. *Gaya kepemimpinan Kepemimpinan Dan Kinerja*, Jakarta, Prenamedia.
- Kusumadilaga, Rimba. 2010. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating*. Skripsi
- Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Maslan Banni. 2012. *Pengaruh kepemimpinan dan Pengawasan terhadap kinerja pegawai PT. PLN (Persero)*. Semarang
- M. Yani. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Mitra Kencana

Oemar Hamalik. 2001. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu. Cetakan Kedua. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Siagian, P. Sondang. 2005. Fungsi-fungsi Manajemen. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.

Sinamo, Jansen H. 2011. Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses. PT Spirit Mahardika. Jakarta.

Singarimbun Masri, Effendi Sofian, 2007: Metodologi Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Cetakan Pertama. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Yusuf Wibisono, 2007, Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility), PT Gramedia, Jakarta